

# PERAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN TERHADAP KINERJA GAPOKTAN DAN PENDAPATAN USAHATANI PADI DI KABUPATEN SUBANG

Hari Hermawan<sup>1</sup>, Suharno<sup>2</sup>, dan Anna Fariyanti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian  
Jl. Tentara Pelajar No.10 Cimanggu Bogor, Indonesia

<sup>2</sup>Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor  
Jl. Kamper, Wing 4 Level 3, Darmaga Bogor, Indonesia  
Email: hari\_deef@yahoo.co.id

Diterima: 30 Agustus 2014; Perbaikan: 23 September 2014; Disetujui untuk Publikasi: 31 Januari 2015

## ABSTRACT

**Role of Rural Agribusiness Development Program to Performance Gapoktan and Rice Farming Income in Subang Regency.** The study aimed to analyze the performance Gapoktan and rice farming income for recipients PUAP and non PUAP, and analyze the relationship between the performances of the farm income Gapoktan. The study was conducted in District Ciasem and Patok Beusi, Subang regency, West Java, in April-June 2014. Unit analysis in this study was Gapoktan and rice farming. Gapoktan sample was purposively taken as 6 Gapoktan, consisting of 3 Gapoktan PUAP and 3 Gapoktan non PUAP. The unit of analysis of rice farming was taken as the sample of rice farming PUAP managed by farmers PUAP and non PUAP. Farmers sample were selected by purposively, amounted to 30 people, so total farmers sample was 60 people. The assessment of Gapoktan has been analyzed by four indicators, namely organizational effectiveness, organizational efficiency, organizational relevance, and organizational financial independence achievement. Overall indicators and parameters were analyzed using a scoring system of assessment in Likert scale. Performance farming and Gapoktan were analyzed using analysis of farming income and analysis Pearson product moment (PPM). The results of data analysis showed that the performance Gapoktan PUAP showed superior performance. PUAP farmers earned greater rice farming income (34.97%). Thus it can be said that the performance Gapoktan have a close and significant relationship with the level of farm income rice farmer members. This means that the higher Gapoktan performance, the higher rice farming income of farmer members.

**Keywords:** *Farmers group alliances, farmers' income, rice farming, rural agribusiness development*

## ABSTRAK

Penelitian yang bertujuan menganalisis kinerja Gapoktan dan pendapatan usahatani padi bagi penerima PUAP dan non PUAP, serta menganalisis hubungan kinerja Gapoktan terhadap pendapatan usahatani padi petani, dilakukan di Kecamatan Ciasem dan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, pada April - Juni 2014. Unit analisis dalam penelitian ini yaitu Gapoktan dan usahatani padi. Gapoktan sampel diambil secara *purposive* sebanyak 6 Gapoktan, terdiri atas 3 Gapoktan PUAP dan 3 Gapoktan non PUAP. Unit analisis usahatani padi, yang diambil sebagai sampel yaitu usahatani padi yang dikelola oleh petani PUAP dan petani non PUAP, dipilih secara *purposive*, masing-masing berjumlah 30 orang, sehingga total petani sampel 60 orang. Analisis kinerja Gapoktan menggunakan 4 indikator yaitu efektivitas organisasi, efisiensi organisasi, relevansi organisasi, dan pencapaian kemandirian keuangan organisasi. Keseluruhan indikator dan parameter dianalisis menggunakan sistem pemberian skor penilaian menggunakan skala Likert. Kinerja usahatani padi dan Gapoktan dianalisis menggunakan analisis pendapatan usahatani dan analisis *Pearson product moment* (PPM). Kinerja Gapoktan PUAP menunjukkan kinerja yang lebih tinggi, sama halnya dengan usahatani padi petani PUAP, memperoleh pendapatan usahatani padi yang lebih tinggi

(34,97%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja Gapoktan memiliki hubungan yang erat dan signifikan dengan tingkat pendapatan usahatani padi petani anggota. Artinya semakin tinggi kinerja Gapoktan, maka semakin tinggi pula pendapatan usahatani padi petani anggota.

**Kata kunci:** *Gapoktan, pendapatan petani, usahatani padi, PUAP*

## PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang strategis dan sangat penting dalam perekonomian nasional, terlihat dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir yang menunjukkan perkembangan cukup signifikan (Saragih, 2010a). Sektor pertanian memiliki kontribusi terhadap PDB rata-rata 14,26%, dengan pertumbuhan rata-rata 3,5% per tahun (BPS, 2013). Sektor ini menyerap tenaga kerja 36,53%. Neraca perdagangan ekspor dan impor tahun 2012 terjadi surplus, yaitu 14.375 juta atau USD 23.141 juta. Selain itu, menurut Saragih (2010b), sektor pertanian merupakan satu-satunya sektor yang mampu bertahan di tengah krisis ekonomi.

Namun demikian, peran strategis sektor pertanian hanya dianggap sebagai sumber tenaga dan bahan-bahan pangan yang murah, demi berkembangnya sektor-sektor industri sebagai 'sektor unggulan' dinamis dalam strategi pembangunan ekonomi nasional. Peranan pertanian dalam pembangunan ekonomi dipandang pasif dan hanya sebagai unsur penunjang (Todaro dan Smith, 2006). Hal ini tercermin dari perkembangan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang relatif kecil, salah satu indikatornya tampak pada perkembangan kredit sektor pertanian yang relatif kecil. Penyaluran kredit untuk sektor pertanian rata-rata sekitar 9,76% selama periode (2009-2012) (Kementerian Pertanian, 2012).

Melihat fenomena tersebut, maka tidak heran seringkali para pelaku agribisnis skala kecil (petani gurem) dan menengah dihadapkan pada permasalahan lemahnya permodalan (Syukur *et al.*, 1998; Nurmanaf, 2007; Ashari, 2009). Bahkan, keterbatasan akses terhadap modal (kredit) diidentifikasi sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan, begitu juga dengan aktivitas usaha

agribisnis menjadi sulit berkembang dan memperoleh peningkatan laba (Yustika, 2013; Akpalu, 2012; Syukur *et al.*, 2000; Mirza, 2000; Moeler dan Thorsen, 2000).

Lebih lanjut Syukur *et al.* (2000) memaparkan, bagi petani-petani yang menguasai lahan sempit, pengalokasian modal secara intensif merupakan kendala, karena sebagian besar petani tidak sanggup mendanai usahatani yang padat modal dengan dana sendiri. Demikian juga yang dikemukakan Hermawan (2011), Xiaoping (2011), dan Supadi serta Sumedi (2004), bahwa keterbatasan modal menyebabkan sirkulasi kegiatan ekonomi tidak berjalan, sehingga proses akumulasi kapital juga tidak bisa terjadi. Selain itu, keterbatasan modal yang dimiliki petani mempengaruhi jumlah benih, pupuk, dan obat-obatan yang dibeli yang digunakan dalam usahatannya, sehingga dapat mempengaruhi tingkat produksi yang diharapkan.

Upaya pemerintah untuk mengatasi lemahnya permodalan tersebut dilakukan dengan meluncurkan program jangka menengah yang fokus pada pembangunan pertanian perdesaan, antara lain adalah Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Ashari, 2009; Hermawan dan Andrianyta, 2012, 2013; Hermawan dan Hendayana, 2012; Kementerian Pertanian, 2013).

Penelitian ini bertujuan : (1) menganalisis kinerja Gapoktan PUAP dan non PUAP, (2) menganalisis pendapatan usahatani padi petani PUAP dan non PUAP, dan (3) menganalisis hubungan kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi petani.

## METODOLOGI

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ciasem dan Patok Beusi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*), atas dasar pertimbangan: (1) merupakan sentra produksi padi di Kabupaten Subang, (2) di kedua kecamatan tersebut terdapat Gapoktan yang mampu menumbuhkembangkan Usaha Simpan Pinjam (USP), dan (3) memiliki usaha ekonomi produktif berbasis agribisnis padi. Pengumpulan data dilakukan pada April-Juni 2014.

### Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperkaya dengan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara ke petani padi menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Data dari Gapoktan dikumpulkan melalui diskusi kelompok terfokus. Untuk melengkapi informasi penelitian, dilakukan juga diskusi dengan penyuluh pertanian lapangan, Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BP4KKP) Kabupaten Subang, serta Kepala Balai

Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa Barat. Data sekunder dikumpulkan dari BPTP Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pembiayaan, Badan Litbang Pertanian, dan instansi terkait lainnya.

### Metode Penentuan Sampel

Gapoktan contoh terdiri dari penerima dana PUAP (tahun 2008-2010) dan Gapoktan yang tidak menerima dana PUAP. Pemilihan Gapoktan contoh dilakukan secara *purposive sampling* (sengaja), dengan pertimbangan memiliki usaha ekonomi produktif berbasis padi, ada unit simpan pinjam yang sudah berjalan, dan asset permodalannya sudah berkembang. Masing-masing Gapoktan contoh ditetapkan tiga Gapoktan.

Petani contoh terdiri dari petani penerima dana PUAP dan yang tidak menerima dana PUAP. Pemilihan petani contoh dilakukan secara *purposive*, berdasarkan kriteria berusaha padi, menerima dana/kredit dari Gapoktan, aktif dalam kegiatan organisasi Gapoktan, dan mengalokasikan dana PUAP untuk membeli input produksi. Berdasarkan kriteria tersebut ditetapkan 30 orang petani contoh untuk padi di Gapoktan PUAP dan padi di Gapoktan Non PUAP (Tabel 1).

Tabel 1. Jumlah petani sampel di tiap Gapoktan terpilih di Kabupaten Subang, Jawa Barat

Nama Gapoktan	Lokasi		Jumlah Anggota (orang)	Jumlah Petani Padi (orang)	Jumlah Sampel (orang)
	Kecamatan	Desa			
Gapoktan PUAP					
Saluyu Utama	Ciasem	Ciasem Tengah	50	15	10
Mitra Tani	Ciasem	Sukahaji	35	7	5
Mitra Tani	Patok Beusi	Tambak Jati	60	22	15
Jumlah			145	44	30
Gapoktan Non PUAP					
Jaya Laksana	Ciasem	Ciasem Hilir	60	15	10
Warga Tani	Ciasem	Pinang Sari	31	14	10
Makmur Tani	Patok Beusi	Ranca Bango	45	14	10
Jumlah			136	43	30

## Metode Analisis

Kinerja Gapoktan dianalisis berdasarkan 4 (empat) indikator, yaitu: efektivitas, efisiensi, relevansi, dan pencapaian kemandirian keuangan organisasi. Penetapan indikator tersebut mengacu pada pedoman penilaian Gapoktan PUAP Kementerian Pertanian (2010), Syahyuti (2012), dan Yustika (2013). Penentuan skor dalam penilaiannya menggunakan skala. Skala terbesar adalah 3 (tiga) dan skala terendah adalah 1 (satu). Selanjutnya ditentukan rentang skala atau selang. Rentang skala tiap kategori penilaian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Skala skor penilaian kinerja Gapoktan

Kategori Kinerja Gapoktan	Rentang Skala
Baik	234 – 300
Cukup	168 – 233
Kurang	100 – 167

Pendapatan usahatani dianalisis berdasarkan struktur penerimaan dengan pembiayaan usahatani. Indikator kelayakan usahatani dianalisis berdasarkan rasio penerimaan (*revenue*) atas biaya (*cost*) (Soekartawi 2006), dengan rumus:

$$R/C = \frac{Revenue}{Cost} = \frac{Q.PQ}{TFC+TVC} \quad [1]$$

Dalam hal ini

- Q = quantum produksi (Ton GKG)
- PQ = harga (Rp/Kg)
- TFC = *Total Fixed Cost*/biaya tetap (Rp/tahun)
- TVC = *Total Variabel Cost*/biaya total input produksi (Rp)

Ketentuan :

- a. Apabila  $R/C > 1$ , maka usahatani dikategorikan layak.
- b. Apabila  $R/C = 1$ , maka usahatani dikategorikan impas.
- c. Apabila  $R/C < 1$ , maka usahatani dikategorikan tidak layak.

Mengingat dana PUAP merupakan pinjaman (hutang), maka pinjaman itu harus dikembalikan. Besarnya pinjaman (hutang) dihitung dari pinjaman pokok ditambah jasa 1,9% selama 4 bulan. Secara matematis besarnya pinjaman yang harus dibayar tersebut dapat dirumuskan (Hermawan dan Hendayana, 2012):

$$d = X + i \quad [2]$$

keterangan :

- d = besarnya modal pinjaman PUAP yang harus dikembalikan (Rp)
- X = total pinjaman pokok (Rp)
- i = tingkat bunga (jasa pinjaman) per tahun (%)

Untuk menganalisis hubungan kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi petani anggota digunakan analisis korelasi *Pearson Product Moment* (PPM), dengan terlebih dahulu mengubah data ordinal ke data interval menggunakan metode suksesif interval (*Method of Succesive Interval/MSI*) (Kuncoro, 2003; Sekaran, 2003).

Korelasi PPM dilambangkan ( $r$ ) dengan ketentuan ( $-1 \leq r \leq +1$ ). Apabila nilai  $r = -1$  artinya korelasinya negatif sempurna,  $r = 0$  artinya tidak ada korelasi, dan  $r = +1$  berarti korelasinya sangat kuat. Besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y ditentukan dengan rumus koefisien determinan sebagai berikut:

$$KP = r^2 \times 100\% \quad [3]$$

keterangan :

- KP = Nilai Koefisien Determinan
- r = Nilai Koefisien Korelasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pelaksanaan PUAP di Kabupaten Subang

Pemerintah menunjuk Gapoktan sebagai organisasi petani di perdesaan yang mengelola dan menyalurkan dana PUAP. Gapoktan sebagai salah satu organisasi pertanian berperan dalam mengatur dana PUAP, agar dana tersebut dapat bermanfaat

bagi anggotanya. Pemerintah memberikan kewenangan pada masing-masing Gapoktan dalam penyaluran dana PUAP kepada anggotanya. Dalam hal ini, tidak ada *Standar Operational Prosedure* (SOP) khusus yang ditetapkan pemerintah pada penyaluran dana PUAP kepada anggotanya. Disini

Gapoktan diberi kebebasan untuk berkreasi didalam pengelolaan dan pemanfaatan dana tersebut. Hal ini disebabkan karena pemerintah mengharapkan adanya partisipasi aktif dari petani itu sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah dana tersebut harus disalurkan untuk keperluan

Tabel 3. Gapoktan yang sudah membentuk LKM-A lingkup Kabupaten Subang

No.	Nama Gapoktan	Kecamatan	Desa
1.	Bina Tani	Tanjungsiang	Rancamanggung
2.	Mekar Wangi	Tanjungsiang	Cibuluh
3.	Mekar Karya	Cisalak	Cisalak
4.	Sri Mukti	Jalancagak	Curugrendeng
5.	Sri Rahayu	Jalancagak	Bunihayu
6.	Mekar Saluyu	Purwadadi	Parapatan
7.	Ligar Jaya	Purwadadi	Koranji
8.	Warga Tani	Ciasem	Pinangsari
9.	Mitra Tani	Ciasem	Sukahaji
10.	Mekar Arum	Anggasari	Sukasasi
11.	Mulya Jaya	Legon Kulon	Karangmulya
12.	Walini Jaya	Pusakanagara	Gempol
13.	Sangling Jaya	Pusakanagara	Kalentambo
14.	Simpar Jaya	Cipunagara	Simpar
15.	Saluyu	Cibogo	Belendung
16.	Nagrog Jaya	Pagaden	Sukamulya
17.	Nanjung	Tanjungsiang	Tanjungsiang
18.	Tani Mukti	Tanjungsiang	Cimeuhmal
19.	Muda Mandiri	Cisalak	Darmaga
20.	Giri Mekar	Cisalak	Sukakerti
21.	Talun Jaya	Cisalak	Gardusayang
22.	Fajar	Kasomalang	Bajongba
23.	Tunas Harapan	Kasomalang	Sukamelang
24.	Saluyu	Kasomalang	Pasanggrahan
25.	Bina Karya	Kasomalang	Tenjolaya
26.	Harapan Jaya	Kasomalang	Kasomalang Kulon
27.	Giri Sakti	Kasomalang	Cimanglid
28.	Mitra Sari	Ciater	Palasari
29.	Cikahuripan	Ciater	Cisaat
30.	Lemah Sugi	Jalancagak	Tambakan
31.	Sari Makmur	Jalancagak	Kumpay
32.	Binangkit	Serangpanjang	Talagasari
33.	Tani Mukti	Serangpanjang	Cijengkol
34.	Mekar Tani	Serangpanjang	Cintamekar
35.	Parung Mulya	Subang	Parung
36.	Sugih Mukti	Subang	Sukamelang
37.	Jayamukti II	Dawuan	Dawuan Kidul
38.	Bina Karya	Kalijati	Kaliangsana
39.	Tani Mukti	Kalijati	Tanggulun Barat
40.	Jayamukti II	Dawuan	Dawuan Kaler

Sumber: BPTP Jawa Barat (2013)

peningkatan kesejahteraan masyarakat tani berbasis pengembangan usaha agribisnis. Dalam hal ini, Gapoktan memiliki aturan main sendiri dalam menyalurkan dana PUAP kepada anggotanya, baik tertulis maupun tidak tertulis, baik formal maupun informal. Berikut dikemukakan keragaan pelaksanaan PUAP pada Gapoktan Contoh di Kabupaten Subang.

Pelaksanaan PUAP di Kabupaten Subang berlangsung tahun 2008, Sampai dengan akhir tahun 2013 melibatkan 217 Gapoktan, dengan realisasi dana Rp2,17 milyar. Pengelolaan dana PUAP oleh Gapoktan dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A). Kabupaten Subang berhasil menumbuhkembangkan sebanyak 40 unit LKM-A (Tabel 3).

Alokasi dana PUAP di Kabupaten Subang, utamanya ditujukan untuk usahatani tanaman pangan (padi), selebihnya dialokasikan untuk usahatani peternakan, hortikultura, perkebunan, dan yang terakhir untuk kegiatan non budidaya (*off*

*farm*) yaitu pengolahan hasil, pemasaran hasil dan usaha lainnya berbasis pertanian (Tabel 4).

### Kinerja Gapoktan Contoh

Secara umum nilai skor Gapoktan PUAP (A, B, dan C) menunjukkan kinerja relatif lebih baik dari pada Gapoktan Non PUAP. Hal itu ditunjukkan nilai skor yang diperoleh Gapoktan PUAP relatif lebih tinggi dari pada nilai skor Gapoktan Non PUAP (X, Y, dan Z). Hasil penilaian terhadap kinerja Gapoktan PUAP dan non PUAP disajikan pada Tabel 5.

Gapoktan PUAP keunggulannya terletak pada konsolidasi kelembagaan, sistem nilai, aturan main, dan sistem koordinasi yang sudah terbangun dengan baik. Struktur kewenangan terbangun dalam kelembagaan Gapoktan PUAP, yang di tuangkan dalam AD/ART. Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat anggota dan rapat pengurus yang dilakukan secara demokratis melalui musyawarah mufakat.

Tabel 4. Alokasi dana PUAP oleh Gapoktan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tahun 2008-2011

Tahun	Usaha Budidaya/ <i>on-farm</i> (Rp. milyar)				Non Budidaya <i>off-farm</i> (Rp. milyar)
	Tan. Pangan	Hortikultura	Perkebunan	Peternakan	
2008	1,74	0,21	0,03	0,34	1,08
2009	2,91	0,48	0,44	0,96	1,71
2010	1,49	0,21	0,08	0,72	1,89
2011	2,81	0,42	0,00	1,15	2,52
Jumlah	8,95	1,32	0,55	3,17	7,20

Sumber: BPTP Jawa Barat (2013)

Tabel 5. Kinerja Gapoktan PUAP dan Non PUAP di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tahun 2014

No.	Indikator Kinerja	Skor					
		Gapoktan PUAP			Gapoktan Non PUAP		
		A	B	C	X	Y	Z
1.	Efektifitas Organisasi	95	98	120	76	66	74
2.	Efisiensi Organisasi	46	42	57	28	28	34
3.	Relevansi Organisasi	22	20	26	16	17	16
4.	Pencapaian Kemandirian Keuangan Organisasi	39	48	81	46	46	46
Jumlah Skor		202	208	284	166	157	170
Kelas Gapoktan:		Cukup (B)	Cukup (B)	Baik (A)	Kurang (C)	Kurang (C)	Cukup (B)

Keterangan:

A, B, C, X, Y, Z : merupakan pengkodean untuk sampel Gapoktan (pengganti nama Gapoktan)

Jika melihat kinerja ketiga Gapoktan PUAP terdapat kecenderungan yang mendapatkan dana PUAP yang terakhir relatif lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gapoktan B lebih baik dari Gapoktan A dan Gapoktan C lebih baik dari Gapoktan B. Diduga hal itu ada kaitan dengan adanya pembelajaran dari periode sebelumnya.

### Pendapatan Usahatani Padi

Dalam struktur pembiayaan usahatani padi, petani PUAP dan non PUAP jelas berbeda (Tabel 6). Total biaya usahatani padi yang dikeluarkan oleh petani PUAP relatif lebih tinggi 34,30% dari petani non PUAP. Hal itu diduga ada kaitan dengan adanya dukungan dana PUAP.

Tambahan modal PUAP, mempengaruhi struktur pembiayaan usahatani. Dengan kata lain, PUAP mampu meningkatkan kemampuan petani dalam menggunakan input produksi. Dari sisi produktivitas padi, petani PUAP menghasilkan produksi yang relatif lebih tinggi dibandingkan petani non PUAP. Selisihnya mencapai 28,26%. Dengan perolehan produksi yang lebih tinggi, maka petani PUAP memperoleh penerimaan lebih

tinggi dibanding petani non PUAP.

Pendapatan petani PUAP setelah dikurangi pembayaran hutangnya ke Gapoktan mencapai Rp14,2 juta. Sementara pendapatan usahatani padi pada petani non PUAP lebih rendah yakni sekitar Rp9,8 juta. Besarnya bunga yang diterima petani non PUAP yakni sebesar 20% per musim tanam.

Jika memperhatikan hasil analisis R/C, usahatani padi pada kedua kelompok responden ternyata secara finansial masuk kategori layak. Nilai R/C petani PUAP dan non PUAP relatif sama, hanya terpaut 0,01. Namun secara absolut pendapatan petani PUAP relatif lebih tinggi.

### Hubungan Kinerja Gapoktan dengan Pendapatan Usahatani Padi Petani

Berdasarkan hasil analisis PPM, terlihat ada hubungan yang erat antara kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi petani anggota (Tabel 7). Korelasi *product moment* antara variabel kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi petani anggota, nilai korelasinya adalah 0,441 (cukup kuat), dan nilai positif yang

Tabel 6. Struktur biaya dan pendapatan usahatani padi petani PUAP dan Non PUAP di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tahun 2014 (Rp/ha)

Uraian	Petani PUAP (Rp.)	Petani Non PUAP (Rp.)	Perbedaan (%)
<b>A. Biaya</b>			
1. Benih	168.333	127.913	31,60
2. Pupuk	1.613.203	1.343.032	20,12
3. Pestisida	1.669.800	814.767	104,94
4. Tenaga Kerja	8.479.889	6.540.833	29,65
5. Biaya lainnya:			
5.1. PBB	50.000	50.000	-
5.2. Iuran Desa	75.000	75.000	-
5.3. Iuran air/ulu-ulu	100.000	100.000	-
Total Biaya (TC)	12.156.225	9.051.545	34,30
<b>B. Penerimaan</b>			
Produksi (kg/ha)	6.657	5.190	28,26
Harga Jual (Rp)	4.200	4.000	5,00
Total Penerimaan (TR)	27.959.400	20.760.000	34,68
<b>C. Pendapatan kotor (TR-TC)</b>	15.803.175	11.708.455	34,97
<b>D. Hutang (<i>risk premium</i>)</b>	1.590.000	1.898.667	
<b>E. Pendapatan Bersih (<math>\pi</math>)</b>	14.213.175	9.809.788	44,89
<b>R/C</b>	2,30	2,29	

Tabel 7. Korelasi kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi petani anggota Gapoktan di Kabupaten Subang, Jawa Barat, tahun 2014

		Kinerja Gapoktan	Pendapatan Usahatani
Kinerja Gapoktan	Pearson Correlation	1	0,441**
	Sig. (2-tailed)		0,000
	N	60	60
Pendapatan Usahatani	Pearson Correlation	0,441**	1
	Sig. (2-tailed)	0,000	
	N	60	60

\*\* Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed)

mengindikasikan pola hubungan antara kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi adalah searah. Semakin tinggi kinerja Gapoktan dapat menunjang semakin meningkatnya pendapatan usahatani padi petani anggota. Berdasarkan uji signifikansinya, nilai  $r_{hitung}$  lebih kecil dari nilai  $\alpha = 0,05$  yang berarti hubungan antara kinerja Gapoktan dengan pendapatan usahatani padi petani anggota adalah signifikan.

Ditinjau dari kontribusi kinerja Gapoktan terhadap pendapatan usahatani padi petani anggota dihitung berdasarkan koefisien penentu (*coefficient of determination*) memakai kaidah persamaan 3, diperoleh nilai jika nilai koefisien korelasi ( $r$ ) = 0,441, maka nilai KP =  $(0,441)^2 * 100\% = 19,45\%$ . Hal ini menunjukkan kontribusi bantuan pinjaman dana PUAP terhadap pendapatan usahatani relatif rendah.

### KESIMPULAN

Bantuan pinjaman dana PUAP untuk usahatani padi telah menunjang peningkatan kinerja Gapoktan menjadi lebih baik. Namun demikian dari sisi kontribusi pinjaman dana PUAP terhadap pendapatan usahatani padi masih relatif kecil, karena korelasi kinerja Gapoktan dengan pendapatan tidak kuat.

Secara finansial bantuan pinjaman dana PUAP tidak secara nyata menunjukkan peningkatan secara relatif. Namun secara absolut cukup besar. Pendapatan petani PUAP hampir 45% lebih tinggi dari petani non PUAP.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akpalu W. 2012. Access to microfinance and intra household business decision making: implication for efficiency of female owned enterprises in Ghana. *The Journal of Socio-Economics*, 41 (1) : 513-518.
- Ashari. 2009. Optimalisasi kebijakan kredit program sektor pertanian di Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 7 (1) : 21-42. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- BPS. 2013. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut Provinsi, September 2013. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?tabel=1&id\\_subyek=23&notab=1](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&id_subyek=23&notab=1) (diakses tanggal 7 April 2014).
- BPTP Jawa Barat. 2013. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahun 2008 sampai 2011 di Jawa Barat. Bandung (ID): BPTP Jawa Barat.



- Hermawan H. 2011. Penambahan modal usahatani melalui bantuan langsung masyarakat dalam perspektif pengembangan usaha agribisnis perdesaan. dalam Bunga Rampai: Petani Butuh Modal. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Hermawan H dan Andrianyta H. 2012. Lembaga keuangan mikro agribisnis: terobosan penguatan kelembagaan dan pembiayaan di perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 10(2): 143-158.
- Hermawan H dan Andrianyta H. 2013. Peran tambahan modal terhadap pendapatan usahatani padi di Kabupaten Blitar dan Ngawi, Jawa Timur. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*. 16 (2): 132-139.
- Hermawan H dan R. Hendayana. 2012. Peran bantuan langsung masyarakat melalui PUAP terhadap struktur pembiayaan dan pendapatan usahatani. *Prosiding, Seminar Nasional Petani dan Pembangunan Pertanian*. Bogor.
- Kementerian Pertanian. 2010. Petunjuk Teknis Peningkatan (Rating) Gapoktan PUAP Menuju LKM-A. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2012. Statistik Makro Sektor Pertanian. Kementerian Pertanian.
- Kementerian Pertanian. 2013. Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2013. 40 hlm. Kementerian Pertanian.
- Kuncoro M. 2003. Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Mirza T. 2000. Kredit Usaha Tani: Antara Harapan dan Kenyataan. *Usahawan*, No.5TH. XXIX. Jakarta.
- Moeler MT dan Thorsen BJ. 2000. A Dynamic Agricultural Household Model With Uncertain Income and Irreversible on Indivisible Investment Under Credit Constraints. <http://ideas.respec.org/p/adh/narheu/2000-7.html>. (diakses tanggal 21 Juni 2013).
- Nurmanaf A. 2007. Lembaga informal pembiayaan mikro lebih dekat dengan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 5(2): 99-109.
- Saragih B. 2010a. Suara Agribisnis Kumpulan Pemikiran Bungaran Saragih. Cetakan Pertama, April 2010. PT Pertama Wacana Lestari.
- Saragih B. 2010b. Agribisnis Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian. Hal. 21-32. IPB Press.
- Sekaran U. 2003. *Research Methods for Business: Skill Building Approach*, Fourth Edition. New York: John Wiley and Sons Inc.
- Soekartawi. 2006. Analisis Usahatani. UI Press.
- Supadi dan Sumedi. 2004. Tinjauan Umum Kebijakan Kredit Pertanian. ICASERD Working Paper No.25, Januari 2004. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian.
- Syahyuti. 2012. Kelemahan konsep dan pendekatan dalam pengembangan organisasi petani: analisis kritis terhadap Permentan No.273 Tahun 2007. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. 10(2): 119-142.
- Syukur M, Sumaryanto, dan Sumedi, 1998. Kinerja kredit pertanian dan alternatif penyempurnaannya untuk pengembangan pertanian. Monograph series No.20, T. Sudaryanto, I. W. Rusastra dan Erizal Jamal (Eds) Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

- Syukur M, Mayrowani H, Sunarsih, Marisa Y, Fauzi M, dan Sutopo. 2000. Peningkatan Peranan Kredit dalam Menunjang Agribisnis di Perdesaan. Laporan Hasil Penelitian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.
- Todaro M,P, Smith S,C. 2006. Pembangunan Ekonomi, Edisi Kesembilan, Jilid 1, Erlangga.
- Xiaoping S. 2011. Improve the Investment and Financing Environment and Promote Sustainable Development of Agriculture in Shandong Province, China. *Management Science and Engineering* 5(4): 50-53.
- Yustika, A.E. 2013. *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Erlangga.